LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN
TAHUN 2023

PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN

TAHUN 2024

KATA PENGANTAR

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi yang dipercayakan kepada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023, disusun berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan disusun pada akhir periode anggaran pelaksanaan program/kegiatan memiliki dua fungsi yaitu merupakan sarana untuk menyampaikan pertanggungjawaban kinerja kepada seluruh *stakeholder* yang berisi informasi tentang keberhasilan dan kegagalan dalam pencapaian indicator kinerja utama organisasi yang telah ditetapkan, serta sebagai sarana dan upaya untuk memperbaiki atau meningkatkan kinerja di masa yang akan datang *(performance improvement)*. Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 – 2026 dijadikan landasan dalam penyusunan dokumen LKjIP Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 untuk mengukur pencapaian kinerja berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2023.

Akhir kata, kami berharap dengan adanya laporan ini dapat memperoleh umpan balik yang bermanfaat guna mewujudkan birokrasi yang bersih, akuntabel, efektif dan efisien dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik, serta Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini dapat menjadi media pertanggungjawaban kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan kepada pemberi mandat dan sarana perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

Kutai Kartanegara, 16 Februari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

HJ. AJI LINA RODIAH, S.E.
Pembina Utama Muda

DAFTAR ISI

Halaman

KATA PENGANTAR .....
DAFTAR ISI .....
BAB I PENDAHULUAN.....
1.1 Latar Belakang.....
1.2 Dasar Hukum.....
1.3 Tupoksi .....
1.4 Permasalahan dan Isu Strategis .....
1.5 Uraian Singkat Organisasi.....
BAB II PERENCANAAN KINERJA.....
2.1 Perencanaan Strategis.....
2.2 Perjanjian Kinerja .....
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA .....
3.1 Capaian Kinerja.....
3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2021.....
BAB IV PENUTUP.....
4.1 Kesimpulan.....
4.2 Perbaikan Kedepan.....
LAMPIRAN

BAB I
PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Terselenggaranya *good governance* merupakan prasyarat bagi setiap pemerintahan untuk mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-cita bangsa bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur, dan legitimate sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih, dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Upaya pengembangan tersebut sejalan dengan dan didasarkan pada TAP MPR RI Nomor XI/MPR/1998 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme, serta Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme. Dalam Pasal 3 Undang-Undang tersebut dinyatakan bahwa asas-asas umum penyelenggaraan negara meliputi asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas profesionalisme, dan asas akuntabilitas. Dalam penjelasan mengenai pasal tersebut, dirumuskan bahwa asas akuntabilitas adalah asas yang menentukan bahwa setiap kegiatan dan hasil akhir dari kegiatan penyelenggaraan negara harus dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat dan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dalam rangka itu, pemerintah telah menerbitkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Inpres tersebut mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta pengelolaan kewenangan pengelolaan sumber daya dengan didasarkan sesuatu perencanaan strategis yang ditetapkan oleh masing-masing instansi. Pertanggungjawaban dimaksud berupa laporan yang disampaikan kepada atasan masing-masing, lembaga-lembaga pengawasan, dan penilai akuntabilitas, dan akhirnya disampaikan kepada Presiden selaku kepala pemerintahan. Laporan tersebut menggambarkan kinerja instansi pemerintah yang bersangkutan melalui Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP).

1.2 Dasar Hukum

Dasar hukum dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

1) Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
2) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
3) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi Atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
4) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama di Lingkungan Instansi Pemerintah.
5) Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama.

1.3 Tugas Pokok dan Fungsi

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara mempunyai tugas pokok membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di bidang kearsipan dan perpustakaan.

Dalam melaksanakan tugasnya Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1) Perumusan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
2) Pelaksanaan kebijakan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
3) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang kearsipan dan perpustakaan;
4) Pelaksanaan administrasi Dinas di bidang kearsipan dan perpustakaan;
5) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati.

1.4 Permasalahan dan Isu Strategis

Dalam pelaksanaan kegiatan terkait tugas pokok dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara tentu akan selalu dihadapkan pada keberhasilan maupun permasalahan. Namun demikian, permasalahan dan segala keterbatasan yang ada bukan menjadi penghalang kegiatan, namun harus menjadi motivasi untuk bergerak maju ke arah yang lebih baik. Permasalahan

yang ada selanjutnya menjadi isu-isu strategis yang akan menjadi dasar kebijakan penetapan visi, misi, tujuan dan sasaran, sehingga visi, misi program dan kegiatan diharapkan mampu menyelesaikan masalah yang dihadapi.

Isu-isu strategis yang dihadapi oleh Dinas Kearsipan dan Perpustakaan diantaranya :

1) Belum terbentuknya budaya baca masyarakat sehingga apresiasi terhadap perpustakaan dan pemanfaatan potensi perpustakaan belum optimal;
2) Keanekaragaman koleksi bahan pustaka masih terbatas sehingga belum dapat memenuhi masyarakat;
3) Belum optimalnya pertumbuhan perpustakaan baik di sekolah maupun di desa;
4) Masih rendahnya minat baca dan minat kunjung ke perpustakaan.
5) Masih kurangnya sarana dan prasarana perpustakaan sehingga banyak wilayah terpencil belum terlayani oleh mobil keliling perpustakaan.
6) Masih rendahnya kesadaran aparatur dalam pengelolaan arsip dilingkungan pemerintah daerah;
7) Belum optimalnya dalam retrieval (pencarian) arsip;
8) Belum optimalnya sarana dan prasarana layanan perpustakaan dan kearsipan;
9) Terbatasnya SDM fungsional pustakawan dan Arsiparis di Kabupaten Kutai Kartanegara.

1.5 Uraian Singkat Organisasi

Kedudukan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara sebagai Perangkat Daerah diatur dengan Peraturan Daerah Nomor 09 tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Kutai Kartanegara serta Peraturan Bupati Kutai Kartanegara Nomor 54 Tahun 2016 tentang kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta Tata kerja perangkat daerah pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara.

Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara merupakan unsur pelaksana urusan pemerintah yang menjadi kewenangan daerah berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

2.1. Perencanaan Strategis

Perencanaan strategis merupakan suatu proses yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahun secara sistematis dan berkesinambungan dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau yang mungkin timbul.

2.1.1 Telaahan Visi dan Misi Kepala Daerah

Visi berkaitan dengan pandangan ke depan menyangkut kemana instansi pemerintah harus dibawa dan diarahkan agar dapat berkarya secara konsisten dan tetapeksis, antisipatif, inovatif, serta produktif. Visi adalah suatu gambaran menantang tentang keadaan masa depan yang berisikan cita dan citra yang ingin diwujudkan instansi pemerintah.

Visi adalah gambaran kondisi ideal yang diinginkan pada masa mendatang oleh pimpinan dan seluruh staf Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara. Visi dan Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah Visi dan Misi Bupati dan Wakil Bupati dalam RPJMD Kabupaten Kutai Kartanegara tahun 2021 - 2026.

Adapun Visinya adalah : "***Terwujudnya Kabupaten Kutai Kartanegara yang Maju, Mandiri, Sejahtera dan Berkeadilan***".

Misi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara adalah mendukung pelaksanaan misi yaitu "***Meningkatkan Sumber Daya Manusia yang berkompeten***"

Visi Kabupaten Kutai Kartanegara 2021-2026 yaitu "Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia".

Misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan oleh instansi pemerintah, sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan. Untuk mencapai visi tersebut ditetapkan misi sebagai berikut:

1. Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani;
2. Meningkatkan Pembangunan Sumber Daya Manusia yang Berakhlak Mulia, Unggul dan Berbudaya;
3. Memperkuat Pembangunan Ekonomi Berbasis Pertanian, Pariwisata dan Ekonomi Kreatif;

4. Meningkatkan Kualitas Layanan Infrastruktur Dasar dan Konektivitas Antar Wilayah;
5. Meningkatkan Pengelolaan Sumber Daya Alam yang Berwawasan Lingkungan

2.1.2 Tujuan dan Sasaran

Berdasarkan telaahan terhadapv isi dan misi Kepala Daerah, maka misi yang relevan dengan tugas dan fungsi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan adalah Misi ke-1 yaitu Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani. Kemudian merujuk kepada misi tersebut, ditetapkan tujuan dan sasaran strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021– 2026 sebagai berikut :

Tabel 2.1
Matrik Hubungan antara Visi, Misi, Tujuan, dan Sasaran

Visi : "***Mewujudkan Masyarakat Kutai Kartanegara yang Sejahtera dan Berbahagia***"				
Misi yang Relevan	**Tujuan**		**Sasaran**	
	Uraian	**Indikator Kinerja**	**Uraian**	**Indikator Kinerja**
Memantapkan Birokrasi yang Bersih, Efektif, Efisien dan Melayani	Terwujudnya Budaya Baca Masyarakat	Nilai Kegemaran Membaca Masyarakat	Terwujudnya Penyelenggaraan Perpustakaan yang Berkulaitas guna mendukung Pengembangan Budaya Baca Masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat
	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Kearsipan pada Perangkat Daerah	Persentase Perangkat Daerah yang Menerapkan Pengelolaan Arsip Kategori B	Terwujudnya Ketersediaan Arsip sebagai Bahan Akuntabilitas Kinerja, Alat Bukti yang Sah dan Pertanggungjawaban Nasional	Tingkat Ketersediaan Arsip

2.1.3 Strategi

Strategi merupakan langkah-langkah yang berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan tujuan dan sasaran. Strategi Dinas Kearsipan dan Perpustakaan untuk periode 2021- 2026 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatkan Sumber Daya Manusia Perpustakaan dan Kearsipan;

2. Peningkatan Sistem Pengelolaan Perpustakaan dan Administrasi Kearsipan;
3. Meningkatkan Budaya Baca, Akses Perpustakaan dan Dimensi Informasi serta Pelestarian Bahan Pustaka dan Naskah Kuno;
4. Pengembangan Koleksi Perpustakaan dan Kearsipan.

2.1.4 Arah Kebijakan

Arah kebijakan merupakan suatu bentuk kongkrit dari usaha pelaksanaan perencanaan pembangunan yang memberikan arahan dan panduan kepada organisasi agar lebih optimal dalam menentukan dan mencapai tujuan. Arah kebijakan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2021 - 2026 yang dikorelasikan dengan strategi pembangunan dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel

Strategi dan Arah Kebijakan

No	Strategi	Arah Kebijakan
1	Peningkatan Penyelenggaraan Reformasi Birokrasi	Peningkatan pelaksanaan pelayanan administrasi perkantoran
		Peningkatan sarana dan prasarana aparatur
		Peningkatan kompetensi SDM aparatur
		Peningkatan kualitas perencanaan dan pelaporan keuangan
		Peningkatan kualitas pengelolaan kearsipan
		Pendampingan pengelolaan Kearsipan kepada setiap OPD
2	Pengembangan Inovasi pelayanan perpustakaan	Pengembangan minat dan budaya baca serta pembinaan Perpustakaan
3	Pengembangan Inovasi Pengelolaan Kearsipan	Pengembangan pengelolaan Kearsipan dan Pembinaan serta Pengawasan Tertib Arsip

2.1.5 Program

Program yang dilaksanakan untuk mendukung capaian sasaran strategis pada tahun 2023, sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel
Keselarasan Program dengan Indikator Kinerja Tahun 2023

SasaranStrategis	Indikator Kinerja	Program
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

2.2. Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja adalah lembar/dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan Program/Kegiatan yang disertai dengan Indikator Kinerja.

Melalui perjanjian kinerja, terwujudlah komitmen penerima amanah dan kesepakatan antara penerima dan pemberi amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas, fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (*outcome*) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya sehingga terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Perjanjian Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 adalah sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Perjanjian Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Keterangan / Rumus Penghitungan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71	Laporan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	85	Nilai Tingkat ketersediaan arsip di peroleh dari persentase arsip aktif yang telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip inaktif yg telah dibuatkan daftar arsip, persentase arsip statis yang telah dibuatkan sarana bantu temu balik dan persentase jumlah arsip yang dimasukkan dalam SIKN melalui JIKN
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	59	Nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat yang didapatkan dengan metode sensus dengan mengukur sejumlah unsur pembangunan literasi masyarakat (UPLM) dan aspek masyarakat (AM)

Tabel
Perbandingan Perjanjian Kinerja Tahun 2023
Dengan Data Awal Tahun 2022 dan Target Tahun 2023

No.	Indikator Sasaran	Satuan	Data Awal (2022)	Target 2023	Target Akhir Renstra 2023
1	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	71	71
2	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	80	85	85
3	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13	59	59

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

Akuntabilitas Kinerja adalah perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan Program dan Kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur dengan sasaran/target Kinerja yang telah ditetapkan melalui laporan kinerja instansi pemerintah yang disusun secara periodik.

Penguatan akuntabilitas kinerja merupakan salah satu program yang dilaksanakan dalam rangka reformasi birokrasi untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas dari KKN, meningkatnya kualitas pelayanan public kepada masyarakat, dan meningkatnya kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi. Penguatan akuntabilitas ini dilaksanakan dengan penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang SAKIP.

3.1. Capaian Kinerja

Kerangka pengukuran capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan dilakukan dengan cara membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja, yang mengacu kepada Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor: 239/IX/6/B/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah. Adapun pengukuran kinerja tersebut menggunakan dua rumus sebagai berikut:

a. Tingkat Realisasi Positif

   Semakin tinggi realisasi menunjukan pencapaian kinerja semakin baik, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Realisasi}{Target} x100\%$$

b. Tingkat Realisasi Negatif

   Semakin tinggi realisasi menunjukan semakin rendah pencapaian kinerja, maka digunakan rumus :

$$Capaian = \frac{Target - (Realisasi - Target)}{Target} x100\%$$

Untuk mempermudah interprestasi atas pencapaian sasaran dan indikator kinerja sasaran digunakan skala pengukuran ordinal. Skala nilai peringkat kinerja berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017, adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Skala Nilai Peringkat Kinerja

Interval Nilai	Kriteria Penilaian
91% ≤ 100%	Sangat Tinggi
76% ≤ 90%	Tinggi
66% ≤ 75%	Sedang
51% ≤ 65%	Rendah
≤ 50%	Sangat Rendah

3.1.1 Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Rata-rata realisasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2022 sebesar 114,27% merujuk pada Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 termasuk dalam kategori peringkat kinerja Rendah. Adapun perbandingan antara target dan realisasi kinerja tahun 2023 sebagaimana tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.1
Perbandingan Antara Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2023

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	71	95,20	134,08	Sangat Tinggi

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Kriteria Penilaian
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	85	75,0003	88,24	Tinggi
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	59	59,99	101,68	Sangat Tinggi
Rata - rata					**108,00**	**Sangat Tinggi**

Adapun penjelasan capaian dari setiap indikator kinerja adalah sebagai berikut:

1) **Indikator Kinerja ke-1**

   Target kinerja "Indikator Kinerja ke-1" tahun 2023 sebesar 71 dan realisasinya 95,20 atau capaian kinerja sebesar 134,08 % (*Laporan Hasil Evaluasi Inspektorat*). Target kinerja tercapai, tidak ada Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja karena Baiknya koordinasi dan konsolidasi antar pelaksana kegiatan secara keseluruhan serta adanya evaluasi kegiatan secara rutin dan berkala dalam pertanggungjawaban laporan pelaksanaan.

2) **Indikator Kinerja ke-2**

   Target kinerja "Indikator Kinerja ke-2" tahun 2023 sebesar 85 dan realisasinya 75,0003 atau capaian kinerja sebesar 88,24 % (*Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah*). Target kinerja kurang tercapai, Dalam pencapaian target kinerja yaitu Adanya pemenuhan data dukung untuk IKK Outcom dan IKK Output dalam penilaian LPPD (*Laporan*

Penyelenggaraan Pemerintah Daerah) tidak terpenuhi yaitu penginputan arsip dinamis dan statis pada aplikasi SIKN dan JIKN karena baru terdaftarnya Akun pada Aplikasi tersebut.

3) Indikator Kinerja ke-3

Target kinerja "Indikator Kinerja ke-3" tahun 2023 sebesar 59 dan realisasinya 59,99 atau capaian kinerja sebesar 101,68 %. Target kinerja tercapai walaupun adanya perubahan dalam penentuan target di tahun 2023, (*Laporan rekapitulasi dengan pemenuhan Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat mulai dari $UPLM_1$ s.d. $UPLM_7$ dan Jumlah populasi sesuai segmentasi berdasarkan lokus/jenis perpustakaan.*

3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Realisasi kinerja tahun 2023 sebesar 108,00%. Sedangkan realisasi kinerja tahun sebelumnya (tahun 2022) sebesar 114,27%. Terjadi penurunan kinerja sebesar 6,27%. Adapun perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan tahun sebelumnya secara rinci tercantum dalam tabel di bawah ini:

Tabel 3.2
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun 2023 dan Realisasi Kinerja Sebelumnya

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Nilai	70	65,84	94,06	71	95,20	134,08	Meningkat
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	Nilai	80	75,00	93,75	85	75,0003	88,24	Menurun

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2022			Tahun 2023			Ket.
			Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	Target Kinerja	Realisasi Kinerja	Persentase Realisasi Kinerja	
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	Nilai	13	20,15	155,00	59	59,99	101,68	Meningkat

3.1.3 Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Perbandingan realisasi kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sampai dengan tahun ini dengan target jangka menengah yang terdapat dalam dokumen perencanaan strategis adalah sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja Sampai Dengan Tahun Ini Dengan Target Jangka Menengah yang Terdapat Dalam Dokumen Perencanaan Strategis

Indikator Kinerja	Target Sasaran Akhir Renstra (Tahun 2023)	Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023	Persentase Realisasi Target Sasaran Renstra Sampai Tahun 2023
Nilai SAKIP Perangkat Daerah	71	95,20	134,08
Tingkat Ketersediaan Arsip	85	75,0003	88,24
Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	59	59,99	101,68

3.1.4 Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Efisiensi penggunaan sumber daya dapat dihitung apabila target kinerja tercapai 100% atau lebih. Penghitungannya dengan cara mengurangkan persentase capaian kinerja dengan persentase penggunaan anggaran. Adapun rincian efisiensi penggunaan sumber daya pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 3.5

Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sasaran Strategis	Indikator kinerja Sasaran	Capaian Kinerja Sasaran	Program	Capaian Realiasai Anggaran Program	Efisiensi (%)	Keterangan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6) = (3-5)	(7)
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	134,08	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	93,13	40,95	
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	88,24	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	84,47	4,17	
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	101,68	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	86,64	15,04	

Pada umumnya capaian kinerja Tahun Anggaran 2023 sudah sesuai dengan target dari masing-masing indikator kinerja yang telah ditetapkan. Dari capaian tersebut, berdasarkan data tersebut diatas dapat di analisis bahwa dari 3 (tiga) sasaran yang terdapat di dalam target rencana strategis Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara melalui pelaksanaan program kegiatan Tahun 2023 dan dihubungkan dengan

capaian kinerja sasaran maka diperoleh gambaran Ke 3 (tiga) sasaran sudah efisien, Analisis Program/Kegiatan/Sub Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan Ataupun Kegagalan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 ini juga dimaksudkan sebagai bahan evaluasi dan pembanding dalam menilai keberhasilan Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Kabupaten Kutai Kartanegara pada periode sebelumnya dan sebagai upaya untuk memperbaiki kinerja pada tahun yang akan datang.

3.1.5 Analisis Program/Kegiatan yang Menunjang Keberhasilan atau pun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Pencapaian realisasi target kinerja sasaran strategis ditunjang dengan pelaksanaan program dan kegiatan yang relevan. Adapun capaian kinerja program dimaksud adalah sebagai berikut:

1) PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA

   Indikator kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota tahun 2023 yaitu Akuntabilitas Kinerja Perangkat Daerah dengan target sebesar Rp. 31.741.717.028,00 dan realisasinya Rp. 29.536.891.567,00 atau capaian kinerja sebesar 93,13%. Target kinerja tercapai, tetapi terdapat Kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja yaitu Perencanaan keuangan dalam rekonsiliasi gaji melebihi Kebutuhan dan kesalahan dalam perencanaan Anggaran solusinya adalah penganggaran harus sesuai dengan kebutuhan, Target kinerja tercapai.

2) PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP

   Indikator kinerja Program Pengelolaaan Arsip tahun 2023 yaitu Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah dengan target sebesar Rp. 1.860.322.000,00 dan realisasinya Rp. 1.626.128.500,00 atau capaian kinerja sebesar 87,46%.Target kinerja tercapai.

3) PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP

   Indikator kinerja Program Pengelolaaan Arsip tahun 2023 yaitu Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah dengan target sebesar Rp. 775.000.000,00 dan realisasinya Rp. 545.029.398,00 atau capaian kinerja sebesar 70,35%.Target kinerja tercapai.

4) PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP

Indikator kinerja Program Pengelolaaan Arsip tahun 2023 yaitu Predikat Pengelolaan Kearsipan Daerah dengan target sebesar Rp. 75.000.000,00 dan realisasinya Rp. 71.693.600,00 atau capaian kinerja sebesar 95,59%. Target kinerja tercapai tetapi terdapat kesalahan dalam perencanaan di kode rekening/belanja pada sub kegiatan.

5) PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN

Indikator kinerja Program Pembinaan Perpustakaan tahun 2023 Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaaan dengan target sebesar Rp. 6.498.281.000,00 dan realisasinya Rp. 5.787.559.806,00 atau capaian kinerja sebesar 89,13%. Target kinerja tercapai tetapi terdapat kesalahan dalam perencanaan di kode rekening/belanja pada sub kegiatan.

6) PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO

Indikator kinerja Program Pembinaan Perpustakaan tahun 2023 Pertumbuhan Kunjungan Masyarakat ke Perpustakaaan dengan target sebesar Rp. 320.000.000,00 dan realisasinya Rp. 256.423.300,00 atau capaian kinerja sebesar 80,14%. Target kinerja tercapai.

Tabel 3.5
Capaian Kinerja Program Penunjang Keberhasilan ataupun Kegagalan Pencapaian Kinerja Sasaran Strategis

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Meningkatnya Transparansi dan Akuntabilitas Kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	100	93,13	93,13	Perlunya suatu tatanan,SOP dan instrumen pertanggung jawaban sebagai data dukung dalam Pelaporan

Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Program Penunjang	Target Kinerja Program	Realisasi Kinerja Program	Persentase Realisasi Kinerja Program	Analisis Keberhasilan / Kegagalan
Terwujudnya ketersediaan arsip sebagai bahan akuntabilitas kinerja, alat bukti yang sah dan pertanggung jawaban nasional	Tingkat ketersediaan arsip	- PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP - PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP - PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	100	84,47	84,47	Perlunya kajian/metode tentang Tata Kelola Arsip dan pengawasan arsip berbasis digital
Terwujudnya Penyelenggaraan perpustakaan yang berkualitas guna mendukung pengembangan budaya baca masyarakat	Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat	- PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN - PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	100	86,64	86,64	Adanya faktor yang mempengaruhi Variabel komponen pembentuk indeks dari Unsur Pembangun Literasi Masyarakat

3.2 Realisasi Anggaran Tahun 2023

Realisasi anggaran program/kegiatan/sub kegiatan Tahun Anggaran 2023 dalam rangka mencapai indikator kinerja sasaran strategis adalah sebesar 91,65%. dengan rincian sebagai berikut:

Tabel 3.6
Realisasi Anggaran Program dan Kegiatan
Tahun 2023

No	Program/ Kegiatan/ Subkegiatan/ Keluaran	VOLUME/ PAGU		REALISASI		
		K	Satuan	K	Satuan	Capaian
2.23.2.23.02 **Program Pembinaan Perpustakaan**			Rp6,498,281,000		Rp5,787,559,806	89,13%
	2.23.02.2.01 Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp4,588,281,000		Rp4,303,070,916	93,85%
	2.23.02.2.01.01 Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik		Rp1,110,000,000		Rp1,106,283,500	99.67%
1	2.23.02.2.01.01.01 Jumlah Layanan Perpustakaan Elektronik yang Dikembangkan dengan Manajemen Layanan TIK Berbasis ISO20000 (ITSM : Information Technology Service Management)	2	Layanan	2	Layanan	100.00%

2.23.02.2.01.02 Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp1,943,281,000		Rp1,816,970,529	93.50%
2	2.23.02.2.01.02.01 Jumlah Perpustakaan yang Dikembangkan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Sesuai Standar Nasional Perpustakaan di Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai Kewenangannya	8	Perpustakaan	8	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.03 Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp75,000,000		Rp72,279,600	96.37%
3	2.23.02.2.01.03.01 Jumlah Koleksi Perpustakaan Khas Dearah Tingkat Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	250	Eksemplar	250	Eksemplar	100.00%
2.23.02.2.01.04 Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota Sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan			Rp350,000,000		Rp297,409,599	84.97%
4	2.23.02.2.01.04.01 Jumlah Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar dan yang Dilakukan Pembinaan dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	12	Perpustakaan	12	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.05 Pembinaan Perpustakaan Khusus Tingkat Kabupaten/Kota			Rp25,000,000		Rp15,536,000	62.14%
5	2.23.02.2.01.05.01 Jumlah Perpustakaan Khusus yang Dibina Sesuai Kewenangan Kabupaten/Kota dalam Mewujudkan Standar Nasional Perpustakaan	2	Perpustakaan	2	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.01.06 Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp300,000,000		Rp240,772,538	80.26%
6	2.23.02.2.01.06.01 Jumlah Tenaga Perpustakaan yang Ditingkatkan Kapasitasnya dan Mendapat Sertifikasi Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	105	Orang	105	Orang	100.00%
2.23.02.2.01.07 Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota			Rp185,000,000		Rp171,509,100	92.71%
7	2.23.02.2.01.07.01 Jumlah Layanan Perpustakaan Rujukan yang Dikembangkan Tingkat Kabupaten/Kota Melalui Peningkatan Koleksi	48	Layanan	48	Layanan	100.00%
2.23.02.2.01.09 Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka			Rp300,000,000		Rp294,534,500	98.18%
8	2.23.02.2.01.09.01 Jumlah Bahan Perpustakaan yang Dilakukan Pengelolaan dan Pengembangan untuk Mewujudkan Keberagaman Koleksi Perpustakaan	46,590	Eksemplar	46,589	Eksemplar	100.00%
2.23.2.02.01.10 Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp300,000,000		Rp287,775,550	95.93%
9	2.23.2.02.01.10.01 Jumlah Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2	Dokumen	2	Dokumen	100.00%
2.23.02.2.02 Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp1,910,000,000		Rp1,484,488,890	77,71%
2.23.02.2.02.01 Sosiaisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat			Rp270,000,000		Rp157,669,900	58.40%
10	2.23.02.2.02.01.01 Jumlah Lokus Pembudayaan Kegemaran Membaca dan Literasi pada Satuan Pendidikan	9	Lokus	9	Lokus	100.00%

2.23.02.2.02.02 Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Rp500,000,000		Rp488,516,235		97.70%
11	2.23.02.2.02.02.01 Jumlah Perpustakaan yang Dibangun di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	1	Perpustakaan	1	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.02.03 Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca		Rp300,000,000		Rp255,360,100		85.12%
12	2.23.02.2.02.03.01 Jumlah Orang yang Mendapatkan Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca Tingkat Kabupaten Kota	7	Orang	7	Orang	100.00%
2.23.02.2.02.04 Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial		Rp790,000,000		Rp536,206,455		67.87%
13	2.23.02.2.02.04.01 Jumlah Perpustakaan Berbasis Inklusi Sosial di Wilayah Kabupaten/Kota yang Dikembangkan	29	Perpustakaan	29	Perpustakaan	100.00%
2.23.02.2.02.05 Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota		Rp50,000,000		Rp46,736,200		93.47%
14	2.23.02.2.02.05.01 Jumlah Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota yang Dipilih dan Didukung Kegiatannya	3	Orang	3	Orang	100.00%
2.23.2.23.03 **Program Pelestarian Koleksi Nasional Dan Naskah Kuno**		Rp320,000,000		Rp256,423,300		80,14%
2.23.03.2.01 Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota		Rp180,000,000		Rp128,144,700		71,24%
2.23.03.2.01.01 Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno		Rp80,000,000		Rp55,693,700		69.62%
15	2.23.03.2.01.01.01 Jumlah Masyarakat yang Berperan Serta dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	2	Orang	2	Orang	100.00%
2.23.03.2.01.02 Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan		Rp100,000,000		Rp72,451,000		72.45%
16	2.23.03.2.01.02.01 Jumlah Naskah Kuno yang Dimiliki oleh Masyarakat yang Dikembangkan untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	5	Eksemplar	5	Eksemplar	100.00%
2.23.03.2.02 Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Rp140,000,000		Rp128,278,600		91,62%
2.23.03.2.02.01 Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Rp90,000,000		Rp86,793,200		96.44%
17	2.23.03.2.02.01.01 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara Hasil Seleksi dan Pengadaan	300	Eksemplar	300	Eksemplar	100.00%
2.23.03.2.02.02 Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara		Rp50,000,000		Rp41,485,400		82.97%
18	2.23.03.2.02.02.01 Jumlah Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang Dilakukan Pengolahan dan Penyiangan	300	Eksemplar	300	Eksemplar	100.00%
2.24.2.24.01 **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota**		Rp	31,741,717,028	Rp29,536,891,567		93,13%
2.24.01.2.01 Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp579,738,367		Rp576,189,397		99,44%

	2.24.01.2.01.01 Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah		Rp73,738,367		Rp73,558,900	99.76%
19	2.24.01.2.01.01.01 Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00%
	2.24.01.2.01.06 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD		Rp256,000,000		Rp255,606,613	99.85%
20	2.24.01.2.01.06.01 Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	4	Laporan	4	Laporan	100.00%
	2.24.01.2.01.07 Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		Rp250,000,000		Rp247,023,884	98.81%
21	2.24.01.2.01.07.01 Jumlah Laporan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	2	Laporan	2	Laporan	100.00%
	2.24.01.2.02 Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Rp10,963,860,219		Rp10,031,403,497	91,56%
	2.24.01.2.02.01 Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN		Rp10,883,860,219		Rp9,951,413,497	91.43%
22	2.24.01.2.02.01.01 Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	1,330	Orang/Bulan	1,330	Orang/Bulan	100.00%
	2.24.01.2.02.07 Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD		Rp80,000,000		Rp79,990,000	99.99%
23	2.24.01.2.02.07.01 Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	12	Laporan	12	Laporan	100.00%
	2.24.01.2.03 Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Rp80,100,000		Rp80,100,000	100,00%
	2.24.01.2.03.05 Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD		Rp80,100,000		Rp80,100,000	100.00%
24	2.24.01.2.03.05.01Jumlah Laporan Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang Milik Daerah pada SKPD	1	Laporan	1	Laporan	100.00%
	2.24.01.2.05 Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah		Rp1,068,816,000		Rp1,023,525,427	95,85%
	2.24.01.2.05.09 Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi		Rp300,000,000		Rp263,829,187	87.94%
25	2.24.01.2.05.09.01 Jumlah orang yang mengikuti pendidikan dan pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi	30	Orang	30	Orang	100.00%
	2.24.01.2.05.01 Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan		Rp420,000,000		Rp412,457,240	98.20%
26	2.24.01.2.05.01.01 Jumlah Orang yang Mengikuti Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	600	Orang	600	Orang	100.00%
	2.24.01.2.05.02 Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya		Rp348,816,000		Rp347,239,000	99.55%
27	2.24.01.2.05.02.01 Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	130	Paket	130	Paket	100.00%
	2.24.01.2.06 Administrasi Umum Perangkat Daerah		Rp11,591,375,374		Rp10,615,407,145	91,62%

2.24.01.2.06.01 Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor			Rp146,466,000		Rp144,819,600	98.88%
28	2.24.01.2.06.01.01 Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	17	Paket	17	Paket	100.00%
2.24.01.2.06.02 Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor			Rp9,094,029,374		Rp8,143,865,950	89.55%
29	2.24.01.2.06.02.01 Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	60	Paket	60	Paket	100.00%
2.24.01.2.06.04 Penyediaan Bahan Logistik Kantor			Rp300,000,000		Rp290,462,900	96.82%
30	2.24.01.2.06.04.01 Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	43	Paket	43	Paket	100.00%
2.24.01.2.06.05 Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan			Rp122,050,000		Rp121,399,310	99.47%
31	2.24.01.2.06.05.01 Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	4	Paket	4	Paket	100.00%
2.24.01.2.06.06 Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan			Rp380,000,000		Rp376,181,100	99.00%
32	2.24.01.2.06.06.01 Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	5,580	Dokumen	5,580	Dokumen	100.00%
2.24.01.2.06.07 Penyediaan Bahan/Material			Rp741,330,000		Rp736,172,676	99.30%
33	2.24.01.2.06.07.01 Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	8	Paket	8	Paket	100.00%
2.24.01.2.06.09 Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD			Rp330,000,000		Rp328,003,915	99.40%
34	2.24.01.2.06.09.01 Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	200	Laporan	200	Laporan	100.00%
2.24.01.2.06.10 Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD			Rp350,000,000		Rp347,088,694	99.17%
35	2.24.01.2.06.10.01 Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	1,500	Dokumen	1,500	Dokumen	100.00%
2.24.01.2.06.11 Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD			Rp127,500,000		Rp127,413,000	99.93%
36	2.24.01.2.06.11.01 Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00%
2.24.01.2.07 Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah			Rp3,545,000,000		Rp3,528,260,000	99,54%
2.24.01.2.07.01 Pengadaan Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Rp2,045,000,000		Rp2,039,860,000	99.75%
37	2.24.01.2.07.01.01 Jumlah Unit Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan Yang Disediakan	6	Unit	6	Unit	100.00%
2.24.01.2.07.02 Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Rp1,500,000,000		Rp1,488,400,000	99.23%
38	2.24.01.2.07.02 .02 Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan Yang Disediakan	7	Unit	5	Unit	71.43%
2.24.01.2.08 Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp1,469,137,068		Rp1,327,403,921	90,40%

2.24.01.2.08.01 Penyediaan Jasa Surat Menyurat			Rp7,000,000		Rp6,990,000	99.86%
39	2.24.01.2.08.01.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	12	Laporan	1	Laporan	8.33%
2.24.01.2.08.02 Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik			Rp383,190,024		Rp277,972,286	72.54%
40	2.24.01.2.08.02.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100.00%
2.24.01.2.08.04 Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor			Rp1,078,947,044		Rp1,042,441,635	96.62%
41	2.24.01.2.08.04.01 Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	Laporan	12	Laporan	100.00%
2.24.01.2.09 Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah			Rp2,443,690,000		Rp2,354,602,180	96,41%
2.24.01.2.09.01 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan			Rp250,000,000		Rp230,567,830	92.23%
42	2.24.01.2.09.01.01 Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	5	Unit	5	Unit	100.00%
2.24.01.2.09.02 Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan			Rp348,000,000		Rp283,119,100	81.36%
43	2.24.01.2.09.02.01 Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	6	Unit	6	Unit	100.00%
2.24.01.2.09.06 Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya			Rp295,690,000		Rp294,396,000	99.56%
44	2.24.01.2.09.06.01 Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	296	Unit	296	Unit	100.00%
2.24.01.2.09.09 Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya			Rp1,550,000,000		Rp1,546,519,250	99.78%
45	2.24.01.2.09.09.01 Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	9	Unit	9	Unit	100.00%
2.24.2.24.02 **Program Pengelolaan Arsip**			Rp1,860,322,000		Rp1,626,128,500	87,46%
2.24.02.2.01 Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota			Rp1,010,322,000		Rp911,729,771	89,14%
2.24.02.2.01.01 Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis			Rp343,962,000		Rp306,862,851	89.21%
46	2.24.02.2.01.01.01 Jumlah Naskah Dinas yang Diciptakan dan Digunakan	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00%
2.24.02.2.01.02 Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis			Rp75,000,000		Rp72,771,100	97.03%
47	2.24.02.2.01.02.01 Jumlah Naskah Dinas yang Dilakukan Pemeliharaan dan Penyusutan	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00%
2.24.02.2.01.03 Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota			Rp591,360,000		Rp532,095,820	89.98%
48	2.24.02.2.01.03.01 Jumlah Laporan Hasil Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	30	Laporan	30	Laporan	100.00%

2.24.02.2.02 Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota			Rp350,000,000		Rp214,547,346	61.30%
2.24.02.2.02.02 Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis			Rp350,000,000		Rp214,547,346	61.30%
49	2.24.02.2.02.02.01 Jumlah Arsip Statis yang Dilakukan Akusisi, Pengolahan, Preservasi dan Akses Arsip Statis	2,400	Arsip	2,400	Arsip	100.00%
2.24.02.2.03 Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota			Rp500,000,000		Rp499,851,383	99.97%
2.24.02.2.03.02 Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota			Rp500,000,000		Rp499,851,383	99.97%
50	2.24.02.2.03.02.01 Jumlah Laporan Hasil Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	5	Laporan	5	Laporan	100.00%
2.24.2.24.03 **Program Perlindungan Dan Penyelamatan Arsip**			Rp775,000,000		Rp545,029,398	70,35~~%~~
2.24.03.2.01 Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			Rp350,000,000		Rp188,739,148	53.93%
2.24.03.2.01.01 Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun			Rp350,000,000		Rp188,739,148	53.93%
51	2.24.03.2.01.01.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (Sepuluh) Tahun	1,000	Arsip	1,000	Arsip	100.00%
2.24.03.2.02 Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota			Rp75,000,000		Rp67,311,400	89.75%
2.24.03.2.02.01 Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana			Rp75,000,000		Rp67,311,400	89.75%
52	2.24.03.2.02.01.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Evakuasi, Identifikasi, Pemulihan dan Penyimpanan Akibat Bencana	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.03.2.03 Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan			Rp175,000,000		Rp170,512,750	97,40%
2.24.03.2.03.01 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp75,000,000		Rp72,791,800	97.06%
53	2.24.03.2.03.01.01 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500	Daftar	500	Daftar	100.00%
2.24.03.2.03.02 Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota			Rp100,000,000		Rp97,720,950	97.72%
54	2.24.03.2.03.02.01 Jumlah Arsip yang Dilakukan Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	500	Arsip	500	Arsip	100.00%

2.24.03.2.04 Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota		Rp100,000,000		Rp74,488,000		74.49%
2.24.03.2.04.02 Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip		Rp100,000,000		Rp74,488,000		74.49%
55	2.24.03.2.04.02.01 Jumlah Daftar Arsip yang Dilakukan Penilaian dan Penetapan Alih Media Sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.03.2.05 Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang		Rp75,000,000		Rp43,978,100		58.64%
2.24.03.2.05.01 Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang		Rp75,000,000		Rp43,978,100		58.64%
56	2.24.03.2.05.01.01 Jumlah Daftar Autentisitas Arsip Statis yang Dinyatakan Hilang yang Dinilai dan Ditetapkan	500	Arsip	500	Arsip	100.00%
2.24.2.24.04 **Program Perijinan Penggunaan Arsip**		Rp75,000,000		Rp71,693,600		95.59%
2.24.04.2.01 Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota		Rp75,000,000		Rp71,693,600		95.59%
2.24.04.2.01.02 Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup		Rp75,000,000		Rp71,693,600		95.59%
57	2.24.04.2.01.02.01 Jumlah Daftar Arsip Hasil Penyediaan Daftar dan Penetapan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	12	Izin	11	Izin	91.67%
JUMLAH		**Rp**	**41,270,320,028**	**Rp**	**37,823,726,171**	**91,65%**

Table 3.7

Sedangkan pada tahun sebelumnya (2022) realisasi angggaran sebesar 89,64%, dengan rincian sebagaimana tercantum pada tabel di bawah ini:

Program/Kegiatan /Sub Kegiatan	Anggaran	Target		Realisasi fisik		Persentase Realisasi	Realisasi Keuangan	Persentase Realisasi	Sisa Anggaran (Rp)
	(Rp)		Satuan		Satuan	(%)	(Rp)	(%)	
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	16,741,273,542.00						15,128,464,471.00	92.64	1,612,809,071.00
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	466,325,600.00					100.00	456,287,996.00	98.69	10,037,604.00
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	132,425,600.00	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00	127,780,091.00	96.49	4,645,509.00

Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	8,155,000.00	1	Dokumen	1	Dokumen	100.00	8,155,000.00	100.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	311,700,000.00	4	Dokumen	4	Dokumen	100.00	306,307,905.00	98.27	5,392,095.00
Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	14,045,000.00	3	Dokumen	3	Dokumen	100.00	14,045,000.00	100.00	0.00
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	11,632,881,955.00					100.00	10,265,859,952.00	90.01	1,367,022,003.00
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	11,395,901,465.00	1,330	Orang/Bulan	1,330	Orang/Bulan	100.00	10,032,735,645.00	88.04	1,363,165,820.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	9,235,000.00	1	Laporan	1	Laporan	100.00	9,235,000.00	100.00	0.00
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	219,840,000.00	3	Laporan	3	Laporan	100.00	218,134,307.00	99.22	1,705,693.00
Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	7,905,490.00	1	Laporan	1	Laporan	100.00	5,755,000.00	72.80	2,150,490.00
Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79,200,000.00					100.00	79,200,000.00	100.00	0.00
Rekonsiliasi dan Penyusunan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	79,200,000.00	1	Laporan	1	Laporan	100.00	79,200,000.00	100.00	0.00
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	154,000,000.00					75.00	128,505,000.00	74.92	25,495,000.00
Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya	104,000,000.00	130	Unit	130	Unit	100.00	103,205,000.00	99.24	795,000.00
Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan	50,000,000.00	2	Inovasi	1	Inovasi	50.00	25,300,000.00	50.60	24,700,000.00
Administrasi Umum Perangkat Daerah	2,030,111,311.00					100.00	1,977,373,953.00	98.57	52,737,358.00

Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	46,466,000.00	15	Jenis	15	Jenis	100.00	46,286,000.00	99.61	180,000.00
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	820,046,100.00	91	Jenis	91	Jenis	100.00	784,320,150.00	95.64	35,725,950.00
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	112,309,524.00	24	Jenis	24	Jenis	100.00	111,966,000.00	99.69	343,524.00
Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	105,600,000.00	82,390	Lembar	82,390	Lembar	100.00	103,588,000.00	98.09	2,012,000.00
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	35,721,000.00	4,000	Exsemplar	4,000	Exsemplar	100.00	35,662,000.00	99.83	59,000.00
Penyediaan Bahan/Material	189,953,687.00	1	Jenis	1	Jenis	100.00	189,874,000.00	99.96	79,687.00
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	422,215,000.00	200	Orang/Hari	200	Orang/Hari	100.00	416,537,603.00	98.66	5,677,397.00
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	297,800,000.00	1,500	Lembar	1,500	Lembar	100.00	289,140,200.00	97.09	8,659,800.00
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,160,639,676.00					100.00	1,026,280,955.00	88.89	134,358,721.00
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	7,000,000.00	12	Bulan	12	Bulan	100.00	7,000,000.00	100.00	0.00
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	383,037,840.00	12	Bulan	12	Bulan	100.00	261,948,605.00	68.39	121,089,235.00
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	770,601,836.00	12	Bulan	12	Bulan	100.00	757,332,350.00	98.28	13,269,486.00
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	1,218,115,000.00					100.00	1,194,956,615.00	97.39	23,158,385.00
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	203,775,000.00	4	Unit	4	Unit	100.00	193,572,000.00	94.99	10,203,000.00

Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	150,000,000.00	6	Unit	6	Unit	100.00	143,177,588.00	95.45	6,822,412.00
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	87,340,000.00	206	Unit	206	Unit	100.00	87,240,000.00	99.89	100,000.00
Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	777,000,000.00	3	Unit	3	Unit	100.00	770,967,027.00	99.22	6,032,973.00
PROGRAM PENGELOLAAN ARSIP	1,600,207,500.00						1,401,314,297.00	89.38	198,893,203.00
Pengelolaan Arsip Dinamis Daerah Kabupaten/Kota	800,000,000.00					100.00	689,835,829.00	88.64	110,164,171.00
Penciptaan dan Penggunaan Arsip Dinamis	200,000,000.00	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00	165,231,129.00	82.62	34,768,871.00
Pemeliharaan dan Penyusutan Arsip Dinamis	50,000,000.00	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00	48,365,000.00	96.73	1,635,000.00
Pengawasan Arsip Dinamis Kewenangan Kabupaten/Kota	550,000,000.00	20	PD	20	PD	100.00	476,239,700.00	86.59	73,760,300.00
Pengelolaan Arsip Statis Daerah Kabupaten/Kota	200,800,000.00					100.00	180,164,250.00	89.72	20,635,750.00
Akuisisi, Pengolahan, Preservasi, dan Akses Arsip Statis	200,800,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	180,164,250.00	89.72	20,635,750.00
		500	Berkas	500	Berkas	100.00			
		22,000	Berkas	22,000	Berkas	100.00			
		500	Berkas	500	Berkas	100.00			
Pengelolaan Simpul Jaringan Informasi Kearsipan Nasional Tingkat Kabupaten/Kota	599,407,500.00					100.00	531,314,218.00	89.76	68,093,282.00

Penyediaan Informasi, Akses dan Layanan Kearsipan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota melalui JIKN	249,407,500.00	10	Unit	10	Unit	100.00	240,564,200.00	96.45	8,843,300.00
Pemberdayaan Kapasitas Unit Kearsipan dan Lembaga Kearsipan Daerah Kabupaten/Kota	350,000,000.00	300	Orang/ Unit Kerja Kearsipan	300	Orang/ Unit Kerja Kearsipan	100.00	290,750,018.00	83.07	59,249,982.00
PROGRAM PERLINDUNGAN DAN PENYELAMATAN ARSIP	300,000,000.00						280,703,990.00	92.59	19,296,010.00
Pemusnahan Arsip Dilingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	50,000,000.00					100.00	50,000,000.00	100.00	0.00
Penilaian, Penetapan dan Pelaksanaan Pemusnahan Arsip yang Memiliki Retensi di Bawah 10 (sepuluh) Tahun	50,000,000.00	1,000	Berkas	1,000	Berkas	100.00	50,000,000.00	100.00	0.00
Perlindungan dan Penyelamatan Arsip Akibat Bencana yang Berskala Kabupaten/Kota	50,000,000.00					100.00	47,955,500.00	95.91	2,044,500.00
Evakuasi dan Identifikasi Arsip Akibat Bencana	50,000,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	47,955,500.00	95.91	2,044,500.00
Penyelamatan Arsip Perangkat Daerah Kabupaten/Kota yang Digabung dan/atau Dibubarkan, dan Pemekaran Daerah Kecamatan dan Desa/Kelurahan	100,000,000.00					100.00	98,458,860.00	98.46	1,541,140.00

Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Penggabungan Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	50,000,000.00	100.00	0.00
Pendataan, Penyusunan Daftar dan Penilaian serta Penyerahan atau Pemusnahan Arsip Bagi Pembubaran Perangkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	48,458,860.00	96.92	1,541,140.00
Autentikasi Arsip Statis dan Arsip Hasil Alih Media Kabupaten/Kota	50,000,000.00					100.00	48,856,700.00	97.71	1,143,300.00
Penilaian dan Penetapan Hasil Alih Media sesuai Persyaratan Penjaminan Keabsahan Arsip	50,000,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	48,856,700.00	97.71	1,143,300.00
Pencarian Arsip Statis Kabupaten/Kota yang Dinyatakan Hilang	50,000,000.00					100.00	35,432,930.00	70.87	14,567,070.00
Penilaian dan Penetapan Autentisitas Arsip Statis yang dinyatakan Hilang	50,000,000.00	500	Berkas	500	Berkas	100.00	35,432,930.00	70.87	14,567,070.00
PROGRAM PERIZINAN PENGGUNAAN ARSIP	50,000,000.00						41,357,180.00	82.71	8,642,820.00
Pelayanan Izin Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup di Kabupaten/Kota	50,000,000.00					100.00	41,357,180.00	82.71	8,642,820.00
Penyusunan dan Penetapan SOP Penggunaan Arsip yang Bersifat Tertutup	50,000,000.00	1	SOP	1	SOP	100.00	41,357,180.00	82.71	8,642,820.00
PROGRAM PEMBINAAN PERPUSTAKAAN	2,983,700,000.00						2,599,299,569.00	91.60	384,400,431.00

Pengelolaan Perpustakaan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	2,638,700,000.00					100.00	2,331,970,569.00	88.97	306,729,431.00
Pengembangan dan Pemeliharaan Layanan Perpustakaan Elektronik	1,110,000,000.00	2	Aplikasi	2	Aplikasi	100.00	1,071,680,480.00	96.55	38,319,520.00
		10,000	Eksemplar	10,000	Eksemplar	100.00			
Pengembangan Perpustakaan di Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	100,000,000.00	10	Unit	10	Unit	100.00	89,660,000.00	89.66	10,340,000.00
Pengembangan Kekhasan Koleksi Perpustakaan Daerah Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	75,000,000.00	250	Eksemplar	250	Eksemplar	100.00	74,420,000.00	99.23	580,000.00
Pembinaan Perpustakaan pada Satuan Pendidikan Dasar di Seluruh Wilayah Kabupaten/Kota sesuai dengan Standar Nasional Perpustakaan	450,000,000.00	10	Perpustakaan	10	Perpustakaan	100.00	428,576,540.00	95.24	21,423,460.00
Peningkatan Kapasitas Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350,000,000.00	120	Orang	120	Orang	100.00	318,732,029.00	91.07	31,267,971.00
Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota	135,800,000.00	36	Desa/Kel	36	Desa/Kel	100.00	133,682,000.00	98.44	2,118,000.00
		6	Bulan	6	Bulan	100.00			
Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Pustaka	67,900,000.00	46,090	Eksemplar	46,090	Eksemplar	100.00	67,498,000.00	99.41	402,000.00
		600	Eksemplar	600	Eksemplar	100.00			

Penyusunan Data dan Informasi Perpustakaan, Tenaga Perpustakaan dan Pustakawan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	350,000,000.00	1	Laporan	1	Laporan	100.00	147,721,520.00	42.21	202,278,480.00
Pembudayaan Gemar Membaca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	345,000,000.00					100.00	267,329,000.00	94.22	77,671,000.00
Sosialisasi Budaya Baca dan Literasi pada Satuan Pendidikan Dasar dan Pendidikan Khusus serta Masyarakat	50,000,000.00	2	Kali/Perkecamatan	2	Kali/Perkecamatan	100.00	46,950,000.00	93.90	3,050,000.00
Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana Perpustakaan di Tempat-Tempat Umum yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	1	Perpustakaan	0	Perpustakaan	0.00	0.00	0.00	50,000,000.00
Pemberian Penghargaan Gerakan Budaya Gemar Membaca	20,000,000.00	4	Penghargaan	4	Penghargaan	100.00	19,595,000.00	97.98	405,000.00
Pengembangan Literasi Berbasis Inklusi Sosial	175,000,000.00	6	Kali/Perkecamatan	6	Kali/Perkecamatan	100.00	151,584,000.00	86.62	23,416,000.00
Pemilihan Duta Baca Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	50,000,000.00	3	Orang	3	Orang	100.00	49,200,000.00	98.40	800,000.00
PROGRAM PELESTARIAN KOLEKSI NASIONAL DAN NASKAH KUNO	258,200,000.00						210,091,000.00	77.83	48,109,000.00
Pelestarian Naskah Kuno Milik Daerah Kabupaten/Kota	163,000,000.00					100.00	115,438,500.00	55.98	47,561,500.00
Peningkatan Peran Serta Masyarakat dalam Penyimpanan, Perawatan, Pelestarian, dan Pendaftaran Naskah Kuno	40,000,000.00	1	Naskah	1	Naskah	100.00	10,730,000.00	26.83	29,270,000.00

Pengembangan, Pengolahan dan Pengalihmediaan Naskah Kuno yang dimiliki oleh Masyarakat untuk Dilestarikan dan Didayagunakan	123,000,000.00	5	Naskah	5	Naskah	100.00	104,708,500.00	85.13	18,291,500.00
Pengembangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara yang ditemukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	95,200,000.00					100.00	94,652,500.00	99.68	547,500.00
Seleksi dan Pengadaan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	84,300,000.00	300	Exsemplar	300	Exsemplar	100.00	83,752,500.00	99.35	547,500.00
Pengolahan dan Penyiangan Koleksi Budaya Etnis Nusantara	10,900,000.00	300	Exsemplar	300	Exsemplar	100.00	10,900,000.00	100.00	0.00
21,933,381,042.00						**97,58**	**19,661,230,507.00**	**89.64**	**2,272,150,535.00**

Dengan demikian, pada tahun 2023 terjadi Peningkatan realisasi anggaran sebesar 2,01%.

BAB IV
PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Secara umum capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023 rata-rata sebesar 91,65% (Sangat Tinggi). dengan rincian sebagai berikut:

1) Capaian kinerja Program Penunjang Urusan pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota sebesar 93,13% (Sangat tinggi).
2) Capaian kinerja Program Pengelolaan Arsip sebesar 87,46% (Tinggi).
3) Capaian kinerja Program Perlindungan dan Penyelamatan Arsip 70,35% (Tinggi).
4) Capaian kinerja Program Perizinan Penggunaan Arsip sebesar 95,59% (Sangat Tinggi).
5) Capaian kinerja Program Pembinaan Perpustakaan sebesar 89,13% (Tinggi).
6) Capaian kinerja Program Pelestarian Koleksi Nasional dan Naskah Kuno sebesar 80,14% (Sangat tinggi).

Capaian kinerja tahun 2023 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana pada tahun 2022 capaian kinerja Dinas Kearsipan dan Perpustakaan sebesar 89,64% atau terjadi kenaikan capaian kinerja sebesar 2,01%.

4.2 Perbaikan Ke Depan

Berdasarkan hasil analisis terhadap faktor penghambat dan pendukung capaian kinerja tahun 2023, maka rencana perbaikan ke depan adalah sebagai berikut:

1) Meningkatkan kualitas pelayanan, pengelolaan, perencanaan dan pelaksanaan yang ditunjang oleh pembinaan administrasi, program anggaran, keuangan dan aset pada Dinas Kearsipan dan Perpustakaan;
2) Meningkatkan Tata Kelola dan Pengawasan Arsip Perangkat Daerah yang efektif dan Efisien;
3) Meningkatkan Minat dan Budaya Baca serta Pembangunan Literasi Masyarakat terhadap perpustakaan.

Demikian Laporan Kinerja Instasi Pemerintah (LKjIP) Dinas Kearsipan dan Perpustakaan Tahun 2023, disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban dan menjadi bahan evaluasi untuk peningkatan kinerja selanjutnya.

Kutai Kartanegara, 16 Februari 2024

Ditandatangani Secara Elektronik Oleh :
KEPALA DINAS KEARSIPAN DAN PERPUSTAKAAN,

HJ. AJI LINA RODIAH, S.E.
Pembina Utama Muda